

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960, LN No. 10 Tahun 1960, TLN No. 104.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. UU Nomor 2 Tahun 2012, LN No. 22 Tahun 2012, TLN No. 5280.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. UU Nomor 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara*, PP Nomor 8 Tahun 1953, LN No. 14 Tahun 1953, TLN No. 362.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan*, PP Nomor 112 Tahun 2000, LN No. 214 Tahun 2000, TLN No. 4031.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah*, PP Nomor 16 Tahun 2004, LN No. 45 Tahun 2004, TLN No. 4385.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 18 Tahun 2021, LN No. 28 Tahun 2021, TLN No. 6630.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, PP Nomor 19 Tahun 2021, LN No. 29 Tahun 2021, TLN No. 6631.

- , *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)*, Perma Nomor 2 Tahun 2019, BN No. 940 Tahun 2019.
- , *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, BN No. 1369 Tahun 2020.
- , *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah*, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, BN No. 1202 Tahun 2021.
- , *Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah*, Perda Nomor 3 Tahun 2016, LD No. 3 Tahun 2016.

#### B. Buku

- Chomzah, Ali Ahmad. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I dan II*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Peradaban, 2007.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Hutagalung, Arie Sukanti, Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahendra, A.A. Oka, Hasanudin. *Tanah dan Pembangunan Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Politis*. Denpasar: Pustaka Manikgeni, 1997.
- Manan, Bagir. *Menjadi Hakim Yang Baik*. Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2008.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.



- Mahkamah Agung-RI. *Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Buku II*. Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2018.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustakan LP3ES, 1998.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Raharjo, Satcipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim HS, Haji, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sardjono H.R., Frieda Husni Hasbullah. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: INDHILL, 2003.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Sitorus, Olan, H.M. Zaki Sierrad. *Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Supriyadi. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yahya, M., Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### C. Lain-lain

Karjoko, Lego, et al. "Refleksi *Paradigma* Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah". *Bestuur*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2019.

Rongiyati, Sulasi. "Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2012.

Roring, Rugeri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997". *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 5 Tahun 2017.

Santoso, Urip. "Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional". *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2 Tahun 2012.

Santoso, Urip. "Pengaturan Hak Pengelolaan". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2008.

Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 28 No. 1 Tahun 2010.

Wardhani, Dwi Kusumo. "Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan Prinsip-Prinsip UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.

Wijaya, Kadek Dwitya Partha. "Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 7 Tahun 2021.

Yusrizal, Muhammad. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

Yusuf, Maulana Syekh et al. "Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) Dan Kewenangan Pelaksanaannya Oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2020.